



2026 PERJANJIAN KINERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHAIRATI KARTINI, SH**
Jabatan : Kepala Seksi Program dan Advokasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAHRIA RIDWAN, SKM, SFT, MAP**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

BAHRIA RIDWAN, SKM, SFT, MAP
NIP. 19690517 199503 2 002

Palu, ²⁷ Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI

KHAIRATI KARTINI, SH
NIP. 197801 20201001 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyediaan Alat Bantu			
	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang mendapatkan alat Bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	2 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang mendapatkan alat Bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	37 Orang	Renstra
2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	45 Orang	Cascading
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	35 Orang	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Rp.	60.676.150	APBD
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp.	11.750.200	APBD
2	Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	48.925.950	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

BAHRIA RIDWAN, SKM, SFT, MAP
NIP. 19690517 199503 2 002

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI

KHAIRATI KARTINI, SH
NIP. 197801 20201001 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD DAVID, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI
TUNA SOSIAL

TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH
NIP. 19721215 199303 2 007

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL

MOHAMMAD DAVID, S.Sos
NIP. 19751017 200701 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial			
	Terlaksananya Bimbingan Mental dan Spiritual Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti	– Jumlah Tuna Sosial Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Mental dan Spiritual Dalam Panti)	-	Cascading
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
2	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
	Anak Terlantar Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	-	Cascading
	Anak Terlantar Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
3	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar bagi Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti	– Jumlah Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	15 Orang	Cascading
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
4	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
	Terpenuhinya Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti	– Jumlah Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra

SUB. KEGIATAN	ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rp	54..288.196,00	APBD
1 Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp	-	APBD
2 Sub. Kegiatan.Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp	-	APBD
3 Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Rp	51.888.196,00	APBD
4 Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	2.400.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL



TRİYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH
NIP. 19721215 199303 2 007

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL



MOHAMMAD DAVID, S.Sos
NIP. 19751017 200701 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOIS ERNA, S. Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **BAHRIA RIDWAN, SKM, SFT, MAP**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

BAHRIA RIDWAN, SKM, SFT, MAP
NIP. 19690517 199503 2 002

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

JOIS ERNA, S. Sos
NIP. 19720520 200211 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PROVINSI

UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyediaan Permakanan			
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	Renstra
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
2	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses			
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 Orang	Cascading
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti			
	Terpenuhinya Orang Yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Anak Terlantar Dalam Panti Yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	10 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang Yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	10 Orang	Cascading
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Rp.	1.757.693.735	APBD
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	1.741.080.000	APBD
2	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp.	994.060	APBD
3	Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp.	8.119.675	APBD
4	Sub. Kegiatan Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Rp.	7.500.000	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

BAHRÍA RIDWAN, SKM, SFT, MAP
NIP. 19690517 199503 2 002

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS

JOIS ERNA, S. Sos
NIP. 19720520 200211 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LILIS, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI
TUNA SOSIAL

TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH
NIP. 19721215 199303 2 007

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL

LILIS, S.Sos
NIP. 19710911 199403 2 006



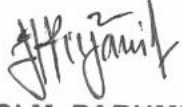
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyediaan Permakanan			
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Permakanan	22 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
2	Penyediaan Sandang			
	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Sandang	20 Orang	Cascading
	Tersedianya Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti			
	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan Tuna Sosial di dalam Panti	– Jumlah Tuna Sosial yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	20 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang Yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
4	Pemulangan ke daerah asal			
	Terlaksananya Layanan Pemulangan ke Daerah Asal bagi Tuna Sosial terlantar Dalam panti	– Jumlah Tuna Sosial Terlantar Dalam Panti yang Mendapatkan Layanan Pemulangan ke Daerah Asal	15 Orang	Cascading
	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	– Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
5	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses			
	Terpenuhinya Kebutuhan Tempat Tinggal Bagi Tuna Sosial Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Tuna Sosial Terlantar Kewenangan Panti yang terpenuhi kebutuhan Tempat Tinggal	20 Orang	Cascading
	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Rp.	82.814.000,00	APBD
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	50.025.000,00	APBD
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp.	11.190.000,00	APBD
3	Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp.	4.988.000,00	APBD

4 Sub. Kegiatan Pemulangan ke daerah asal	Rp.	13.730.000,00	APBD
5 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp.	2.881.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI
TUNA SOSIAL



TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH
NIP. 19721215 199303 2 007

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL



LILIS, S.Sos
NIP. 19710911 199403 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SITI WARDANI, SE., MM**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI
TUNA SOSIAL

TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH

NIP. 19721215 199303 2 007

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

SITI WARDANI, SE., MM

NIP. 19740218 200701 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Tersusunnya Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	- Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	1	Cascading
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Renstra
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Cascading
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Renstra
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Tersedianya Layanan Umum Kantor Yang Dikelola	- Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1	Cascading
	Tersedianya Layanan Umum Kantor Yang Dikelola	- Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	16.360.000,00	APBD
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	16.360.000,00	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	22.038.233,00	APBD
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	17.999.653,00	APBD
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	4.038.580,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL

TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH
NIP. 19721215 199303 2 007

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

SITI WARDANI, SE., MM
NIP. 19740218 200701 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBERTIAN METOLI, S. Th**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial Lansia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA


RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL LANSIA


ROBERTIAN METOLI, S. Th
NIP. 19690513 200701 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PROVINSI

UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA

ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyediaan Permakanan			
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Renstra
2	Penyediaan Sandang			
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Kewenangan Provinsi	45 Orang	Cascading
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Kewenangan Provinsi	50 Orang	Renstra
3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni kewenangan Provinsi	45 Orang	Cascading
	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni ewenangan Provinsi	50 Orang	Renstra
4	Penyediaan Alat Bantu			
	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang mendapatkan alat Bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	2 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang mendapatkan alat Bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan provinsi	18 Orang	Renstra
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	45 Orang	Cascading
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	50 Orang	Renstra
2	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	45 Orang	Renstra
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Renstra
3	Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar kewenangan Provinsi	45 Orang	Renstra
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar kewenangan Provinsi (Orang)	50 Orang	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Rp.	13.959.000	APBD
1	Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	1.800.000	APBD
2	Sub. Kegiatan. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp.	3.159.000	APBD
3	Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar	Rp.	9.000.000	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA


RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
BINA KETERAMPILAN


RIDA SULO, SE
NIP. 19780806 200901 2 004

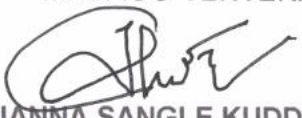


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	45 Orang	Cascading
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	50 Orang	Renstra
2	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	45 Orang	Renstra
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Renstra
3	Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar kewenangan Provinsi	45 Orang	Renstra
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar kewenangan Provinsi (Orang)	50 Orang	Renstra

SUB. KEGIATAN	ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di dalam Panti	Rp.	13.959.000	APBD
1 Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	1.800.000	APBD
2 Sub. Kegiatan. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp.	3.159.000	APBD
3 Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Kesehatan Dasar	Rp.	9.000.000	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA


RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
BINA KETERAMPILAN


RIDA SULO, SE
NIP. 19780806 200901 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAN PUA LEMBANG, SE**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA


RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA


YAN PUA LEMBANG, SE
NIP. 19830703 200701 1 009

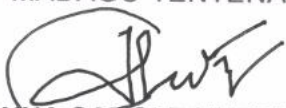


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Tersusunnya Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	- Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	1	Cascading
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Renstra
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Cascading
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Renstra
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Tersedianya Layanan Umum Kantor Yang Dikelola	- Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1	Cascading
	Tersedianya Layanan Umum Kantor Yang Dikelola	- Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp.	20.410.000	APBD
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	20.410.000	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp.	34.018.151,81	APBD
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	18.000.001,81	APBD
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	16.018.150	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA
MADAGO TENTENA


RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA


YAN PUA LEMBANG, SE
NIP. 19830703 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GRIS RATNA FRELVA BEBA, S.Sos., M. Si**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK



RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog

NIP. 19710113 200112 1 001

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL



GRIS RATNA FRELVA BEBA, S.Sos., M. Si

NIP. 19750828 200212 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyediaan Permakanan			
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
2	Penyediaan Sandang			
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Anak Terlantar Dalam Panti	– Jumlah Anak Terlantar Dalam Panti Yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Sandang	35 Orang	Cascading
	Tersedianya Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti			
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Anak Terlantar Dalam Panti	– Jumlah Anak Terlantar Dalam Panti Yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	35 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang Yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial			
	Anak Terlantar Yang Mendapatkan Bimbingan Mental Dan Spiritual	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	Cascading
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			
	Anak Terlantar Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	Cascading
	Anak Terlantar Yang Mendapatkan Keterampilan Hidup	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
6	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses			
	Terpenuhinya Kebutuhan Tempat Tinggal Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	35 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Kebutuhan Tempat Tinggal Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
7	Pengasuhan			
	Terpenuhinya Kebutuhan Akses Layanan Pengasuhan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	5 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Kebutuhan Akses Layanan Pengasuhan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Rp.	135.922.525	APBD
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	50.000.000	APBD
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp.	19.302.000	APBD
3	Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp.	4.257.325	APBD
4	Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	49.965.700	APBD
5	Sub. Kegiatan.Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp.	6.000.000	APBD
6	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Rp.	1.897.500	APBD
7	Pengasuhan	Rp.	4.500.000	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog
NIP. 19710113 200112 1 001

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PELAYANAN SOSIAL

GRIS RATNA FRELVA BEBA, S.Sos., M. Si
NIP. 19750828 200212 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RACHMAD, S. Sos**

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog

NIP. 19710113 200112 1 001

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

RAHMAD, S. Sos

NIP. 19700110 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Tersusunnya Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	- Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	1	Cascading
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Renstra
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Cascading
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Renstra
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Tersedianya Layanan Umum Kantor Yang Dikelola	- Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1	Cascading
	Tersedianya Layanan Umum Kantor Yang Dikelola	- Jumlah laporan Layanan umum kantor yang dikelola	1	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp.	11.720.000	APBD
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	11.720.000	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp.	21.371.475	APBD
1	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	18.871.975	APBD
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	2.499.500	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog
NIP. 19710113 200112 1 001

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB. BAGIAN
TATA USAHA

RAHMAD, S. Sos
NIP. 19700110 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAFRI ARIF, S.Kom., MM**

Jabatan : Kepala Seksi Program dan Advokasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog

NIP. 19710113 200112 1 001

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI

SYAFRI ARIF, S.Kom., MM

NIP. 19730915 200212 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
ESELON IV

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
	Terpenuhinya Kebutuhan Akses Layanan Kesehatannya Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
2	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
	Terpenuhinya Kebutuhan Keluarga Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provins	5 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	Renstra
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi	– Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan provinsi	35 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	35 Orang	Renstra
4	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti			
	Terpenuhinya Kebutuhan Akses Layanan Pengasuhan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	5 Orang	Cascading
	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	5 Orang	Renstra
5	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar			
	Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitasi Data Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Panti	– Jumlah Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	– Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	Renstra

SUB. KEGIATAN		ANGGARAN		KET
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Rp.	5.970.000	APBD
1	Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp.	1.800.000	APBD
2	Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp.	1.090.000	APBD
3	Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp.	1.090.000	APBD
4	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Rp.	1.090.000	APBD
5	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Rp.	900.000	APBD


PIHAK KEDUA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK

RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog
NIP. 19710113 200112 1 001

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SEKSI
PROGRAM DAN ADVOKASI


SYAFRI ARIF, S.Kom., MM
NIP. 19730915 200212 1 001



2026 PERJANJIAN KINERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

**SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP, MM**

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

KIKI REZQI RAMDANIASARI, S.STP, MM

NIP. 19790727199711 2 001

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727198603 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PROVINSI

SEKRETARIAT

ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang sekretariat	- Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	70,05	Cascading
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	- Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,05	Renstra
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KET
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Meningkatnyakualitas perencanaan, Pengukuran, evalausi dan pelaporan	- Nilai SAKIP	86	Cascading
	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evalausi dan pelaporan	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	Renstra
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	Renstra
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	Renstra
		- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	Renstra
		- Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	150	Renstra
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100 %	Cascading
	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	183	Renstra
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daera	4,5	Cascading
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	Renstra

NO	SASARAN SUB. KEGIATAN	INDIKATOR SUB. KEGIATAN	TARGET	KET
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Cascading
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Renstra
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA	- Jumlah dokumen RKA dan DPA	4	Cascading
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	Renstra
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Cascading
	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Renstra
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Tersusunnya Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	- Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	2	Cascading
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Renstra
8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	150	Renstra
9	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			
	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Renstra

PROGRAM		ANGGARAN		KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	30.198.357.785,99	APBD

1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	9.018.596.775	APBD
	1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	5.145.750	APBD
	2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	23.798.750	APBD
	3. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	4.986.600	APBD

	4. Sub.Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp.	2.165.800	APBD
	5. Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp.	8.982.499.875	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	20.314.078.912,12	APBD
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	39.500.050	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	113.129.834	APBD
	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	113.129.834	APBD
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	-	APBD
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	397.692.252,97	APBD
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp.	166.000.011,90	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIEKFANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS



KIKI REZQI RAMDHANASARI, S.STP, MM
NIP. 19790727 199711 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUASTINA, SH., MH

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

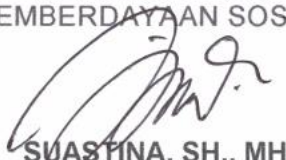
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL

SUASTINA, SH., MH
NIP. 19730726 200002 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KET
1	Pemberdayaan Sosial			
	Meningkatnya Peranan Sosial	- Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	100 %	Cascading
		- Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitas dalam pelayanan sosial	6 %	Cascading
		- Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100 %	Cascading
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	- Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	100 %	Renstra
		- Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitas dalam Pelayanan Sosial	50 %	Renstra
		- Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	6 %	Renstra
		- Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	20 %	Renstra
		- Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	50 %	Renstra
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	- Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100 %	Renstra
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Sosial Dan Dunia Usaha	- Persentase Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uan Barang Kewenangan Provinsi Yang Terbit	100 %	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Lembaga Sosial Dan Dunia Usaha	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	Renstra
2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha dan Masyarakat	- Presentase Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha dan yang ditingkatkan Kapasitasnya	6 %	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha dan Masyarakat	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	20	Renstra

		- Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	2	Renstra
3	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
	Meningkatnya Layanan Taman Makam Pahlawan Provinsi	- Persentase Permintaan Layanan Taman Makam Pahlawan Provinsi Yang Di Fasilitas	100 %	Cascading
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	- Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	Renstra
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	
1	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Garatis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang/Barang	- Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang / Barang	100 %	Cascading
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10	Renstra
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga, Dunia Usaha Dan Masyarakat	- Jumlah Lembaga, Dunia Usaha Dan Masyarakat Yang Mendapatkan Bimbingan Pelayanan Sosial	3 Keluarga	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	- Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Keluarga)	8 Keluarga	Renstra
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			
	Terbimbingnya Dalam Pelayanan Kesos Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Dan Dunia Usaha	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Dan Dunia Usaha Yang Menerima Bimbingan, Pelatihan, Pemantapan Dalam Pelayanan Kesos	8 Lembaga	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi (Lembaga)	20 Lembaga	Renstra
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi			
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	- Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	40 Orang	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	- Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	100 Orang	Renstra
5	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional			
	Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	- Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional (Orang)	5 Orang	Cascading
	Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	- Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional (Orang)	1 Orang	Renstra

6	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi			
	Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	30 Lembaga	Cascading
	Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	30 Lembaga	Renstra
7	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota			
	Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	- Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar (Layanan)	13 Layanan	Cascading
	Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	- Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar (Layanan)	2 Layanan	Renstra
8	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
	Terpeliharanya Fasilitas Taman Makam Pahlawan Provinsi	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Provinsi)	1	Cascading
	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	- Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provins	1	Renstra
	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	- Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	400	Cascading
	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	- Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	400	Renstra

PROGRAM		ANGGARAN		KET
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	118.346.000,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	46.147.050,00	APBD

1	Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		4.845.800	APBD
	1. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp.	4.845.800	APBD
2	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		113.500.200,00	APBD
	1. Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp.	18.850.000,00	APBD
	2. Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp.	35.999.700,00	APBD
	3. Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Rp.	17.149.800,00	APBD
	4. Sub. Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Rp.	1.037.500,00	APBD

	5. Sub. Kegiatan Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Rp.	10.970.000,00	APBD
	6. Sub. Kegiatan Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Rp.	14.784.750,00	APBD
	7. Sub. Kegiatan Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Rp.	14.708.450,00	APBD
3	Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		46.147.050,00	APBD
	1. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp.	21.677.050,00	APBD
	2. Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Rp.	24.470.000,00	APBD

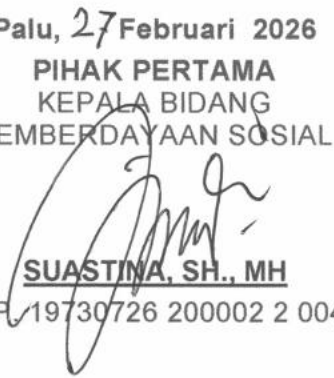
PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKLANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL



SUASTINA, SH., MH
NIP. 19730726 200002 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SANTI DARMIATI, SST., MPH**

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

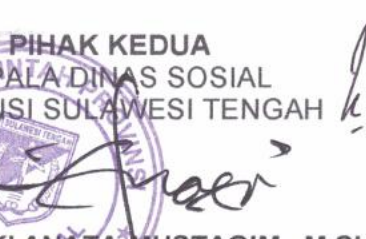
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

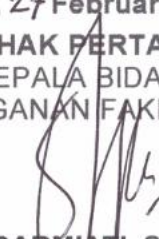
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN

SANTI DARMIATI, SST., MPH
NIP. 19790508 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Ket
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi	- Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,03 %	Cascading
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	0,03 %	Renstra
		- Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	1 %	Renstra
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
	Meningkatnya Cakupan Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Perorangan	- Persentase Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Perorangan	0,03 %	Cascading
	Meningkatnya Cakupan Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Kelompok	- Persentase Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Kelompok		
	Meningkatnya Cakupan Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha	- Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	1200	Renstra
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB.KEGIATAN	TARGET	
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			
	Terpenuhinya Bantuan Modal Usaha Bagi Perorangan Atau Kelompok Yang Kurang Mampu	- Jumlah Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Perorangan Maupun Kelompok	17 KUBE 120 Orang	Cascading
		- Jumlah Keluarga Miskin Dan Tidak Mampu/Kelompok Yang Menerima Bantuan Modal Usaha Perorangan Maupun Kelompok	1370 Orang	Cascading
	Meningkatnya cakupan keluarga miskin dan tidak mampu/kelompok yang menerima bantuan modal usaha	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi (Orang)	1200	Renstra
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	- Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin (Kab/Kota)	13	Renstra

PROGRAM		ANGGARAN		KET
1	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp.	2.713.999.725,00	APBD
1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Rp.	2.713.999.725,00	APBD
	1. Sub. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp.	2.713.999.725,00	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN



SANTI DARMIATI, SST., MPH
NIP. 19790508 200112 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ABD. GAFAR MALO, M.Hi**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Dr. ABD. GAFAR MALO, M. HI

NIP. 19681121 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KET
1	Program Penanganan Bencana			
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	- Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	Cascading
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	- Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	Renstra
		- Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	100 %	Renstra
		- Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %	Renstra
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,06 %	Cascading
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	- Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,06 %	Renstra
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
	Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	- Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Bantuan Logistik Makanan	100 %	Cascading
		- Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	100 %	Cascading
	Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	- Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	667	Renstra
		- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	150	Renstra
		- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	150	Renstra
		- Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	4	Renstra

		- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	100	Renstra
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
	Meningkatnya Cakupan Keluarga Kurang Mampu Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Presentase Keluarga Kurang Mampu Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	0,06 %	Cascading
	Meningkatnya Cakupan Keluarga Kurang Mampu Yang Mendapatkan Bantuan Sosial	- Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	7652 Keluarga	Renstra
NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	KET
1	Penyediaan Permakanan			
	Tersedianya Layanan Bantuan Logistik Makanan Terhadap Korban Bencana	- Jumlah Paket Bantuan Makanan Bencana Alam	469 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	- Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	667 Orang	Renstra
2	Penyediaan Sandang			
	Tersedianya Layanan Bantuan Penyediaan Sandang Terhadap Korban Bencana	- Jumlah Paket Bantuan Sandang Bencana Alam	80 Paket	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi (Orang)	150 Orang	Renstra
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
	Tersedianya Layanan Bantuan Tempat Penampungan Pengungsi Terhadap Korban Bencana	- Jumlah Tempat Pengungsi Bencana Alam	-	Cascading
	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	- Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi (Orang)	4 Orang	Renstra
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
	Tersedianya Layanan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan	- Jumlah Orang Kelompok Rentan Yang Mendapatkan Layanan Perlindungan Sosial Pra Bencana	-	Cascading
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)	100 Orang	Renstra
5	Pelayanan Dukungan Psikososial			
	Tersedianya Layanan Psikososial Terhadap Korban Bencana	- Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	15 Orang	Cascading
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)	150 Orang	Renstra
6	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Keluarga Yang Kurang Mampu	- Jumlah Keluarga Yang Kurang Mampu Yang Mendapatkan	961	Cascading



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TRİYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosil Rehabilitasi Tuna Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, **27** Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL



TRİYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH
NIP. 19721215 199303 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	– Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	92	Cascading
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	– Indeks Kepuasan Masyarakat	92	Renstra
2	Progrm Rehabilitasi Sosial			
	Meningkatnya Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Pulih Fungsi Sosialnya	– Persentase Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100	Cascading
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Pant	– Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	Renstra
		– Persentase Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	Renstra
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KET
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,5	Cascading
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	Renstra
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	– Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Cascading
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	– Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Renstra
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
	Meningkatnya Penanganan Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	– Persentase Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Terpenuhi Hak Dasarnya	100	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Tuna Sosial Kewenangan Panti Dalam Pemenuhan Fungsi Sosialnya	– Persentase Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosial	100	Cascading
	Meningkatnya Penanganan Tuna Sosial Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	– Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi (Orang) Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	5	Renstra

	- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET
	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL	Rp.	175.500.429	APBD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	38.398.233	APBD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	16.360.000	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	22.038.233	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	255.715.200	APBD
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Rp.	255.715.200	APBD

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL


Drs. RIFKI ANATA M
NIP. 19670727 19

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Prigodil

TRIYANI WIDIYA NINGSI M. PARUMPU, SKM, MPH
NIP. 19721215 199303 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO
TENTENA



RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut
NIP. 19740613 200003 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO TENTENA
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago tentena	- Indeks Kepuasan Masyarakat	92	Cascading
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago tentena	- Indeks Kepuasan Masyarakat	92	Renstra
2	Program Rehabilitasi Sosial			
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	- Persentase Lanjut Usia Terlantar Dalam Pantiyang TerpenuhiKebutuhan Dasarnya Dalam Panti	10 0	Cascading
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	- Persentase Lanjut UsiaTerlantar Dalam Panti yang Terpe uhiKebutuhan Dasarnya	10 0	Renstra
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KET
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daera	4,5	Cascading
	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	2	Renstra
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	4,5	Cascading
	meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	- Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan (Laporan)	1	Renstra
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang	1	Renstra
3	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
	Meningkatnya Penanganan Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	- Persentase Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	100	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti Dalam Pemenuhan Fungsi Sosialnya	- Presentase Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Panti yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosialnya	100	Cascading
	Meningkatnya penanganan lanjut usia terlantar kewenangan panti yang terpenuhi hak dasarnya	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	50	Renstra
		- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	18	Renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BAHRIA RIDWAN, SKM, SFT, MAP**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS


BAHRIA RIDWAN, SKM, SFT, MAP
NIP. 19690517 199503 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PROVINSI

UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT.Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	– Indeks Kepuasan Masyarakat	92	Cascading
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT.Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	– Indeks Kepuasan Masyarakat	92	Renstra
2	Program Rehabilitasi Sosial			
	Meningkatnya Pelayanan Sosial kepada PMKS	– Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Panti yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya untuk mendukung SPM Bidang Sosial	100	Cascading
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	– Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	Renstra
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KET
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	– Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,5	Cascading
	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	– Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	2	Renstra
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat daerah	– Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	4,5	Cascading
	meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	– Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan (Laporan)	1	Renstra
		– Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Renstra
3	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			
	Meningkatnya Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	– Persentase Penyandang disabilitas terlantar Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	100	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Penyandang disabilitas Terlantar Kewenangan Panti Dalam Pemenuhan Fungsi Sosialnya	– Presentase Penyandang disabilitas Terlantar Kewenangan Panti yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosialnya	100	Cascading
	Meningkatnya Penyandang Disabilitas Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
		– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra

	- Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	37	Renstra
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5	Renstra
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	5	Renstra
	- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KET
	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	Rp	1.855.099.635,25	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	36.729.750,25	APBD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	29.934.000	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	6.795.750,25	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	1.818.369.885	APBD
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Rp	1.818.369.885	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIEKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS


BAHRIA RIDWAN, SKM, SFT, MAP
NIP. 19690517 199503 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog**

Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M. Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e- MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M. Si

NIP. 19670727 198603 1 005

Palu, 27 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK



RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog

NIP. 19710113 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. PANTI SOSIAL ANAK
ESELON III

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Anak	– Indeks Kepuasan Masyarakat	92	Cascading
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan UPT. Panti Sosial Anak	– Indeks Kepuasan Masyarakat	92	Renstra
2	Program Rehabilitasi Sosial			
	Meningkatnya Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Pulih Fungsi Sosialnya	– Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Telah Pulih Fungsi Sosialnya Untuk Mendukung SPM Bidang Sosial	100	Cascading
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dalam Pant	– Persentase Anak Terlantar Dalam Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	Renstra
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KET
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	- Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4,5	Cascading
	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	– Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	2	Renstra
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat daerah	– Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah	4,5	Cascading
	meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	– Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantoryang Disediakan (Laporan)	1	Renstra
		– Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Renstra
3	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			
	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	– Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Terpenuhi Hak Dasarnya	100	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Mental dan Spritual Anak Terlantar Kewenangan Panti Dalam Pemenuhan Fungsi Sosial	– Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Mental dan Spritual Pemenuhan Fungsi Sosial	100	Cascading
	Meningkatnya Kapasitas Keterampilan Anak Terlantar Dalam Pemenuhan Fungsi Sosial	– Persentase Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Kapasitas Keterampilan Pemenuhan Fungsi Sosial	100	Cascading
	Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar Kewenangan Panti Yang Terpenuhi Hak Dasarnya	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra

	– Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	– Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	– Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi (Orang)	5	Renstra
	– Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	– Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	= Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	– Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra
	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	5	Renstra
	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)	5	Renstra
	– Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi (Orang)	35	Renstra

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET
	UPT. PANTI SOSIAL ANAK		174.984.000	APBD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	33.091.475	APBD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	11.720.000	APBD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	21.371.475	APBD
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	141.892.525	APBD
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Rp.	141.892.525	APBD

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M. Si
NIP. 19670727 198603 1 005

~~Pada, 27 Februari 2026~~

~~PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT
PANTI SOSIAL ANAK~~


RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi.Psikolog
NIP. 19710113 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

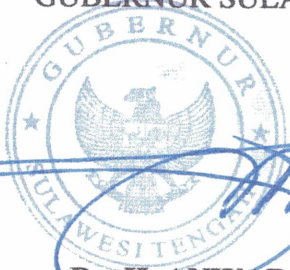
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

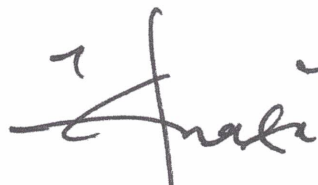
Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



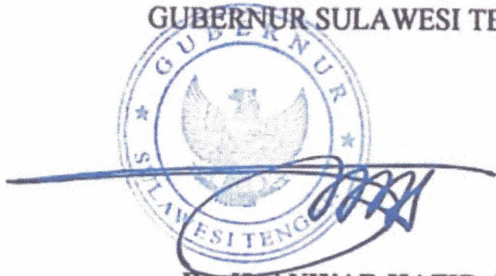
Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670727 198603 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Nilai Dimensi Kebutuhan Dasar	14
2	Meningkatnya Peranan Sosial	Nilai Dimensi Peranan Sosial	16
3	Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi	Nilai Dimensi Keberdayaan Ekonomi	22

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
I Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	34.595.884.070,99	APBD
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.410.991.785,99	APBD
• Program Pemberdayaan Sosial	118.346.000,00	APBD
• Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0,00	APBD
• Program Rehabilitasi Sosial	5.065.436,900,00	APBD
• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.754.520.445,00	APBD
• Program Penanganan Bencana	200.441.890,00	APBD
• Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	46.147.050,00	APBD
II Upt. Panti Sosial Anak	174.984.000,00	APBD
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.091.475,00	APBD
• Program Rehabilitasi Sosial	141.892.525,00	APBD
III Upt. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	175.500.429,00	APBD
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	38.398.233,00	APBD
• Program Rehabilitasi Sosial	137.102.196,00	APBD
IV Upt. Panti Sosial Tresna Werdha "Madago" Tentena	1.355.374.851,81	APBD
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.428.151,81	APBD
• Program Rehabilitasi Sosial	1.300.946.700,00	APBD
V Upt. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	1.855.099.635,25	APBD
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	36.729.750,25	APBD
• Program Rehabilitasi Sosial	1.818.369.885,00	APBD

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. RIFKI ANATA MUSTAQIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19670727 198603 1 005